



RENJA PERUBAHAN 2025





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.....	8
2.2 Analisis Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	25
2.3 Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.....	27
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III.....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup.....	47
BAB IV	48
4.1 Program dan Kegiatan	48
BAB V	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan tentang evaluasi serta rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu, Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah maupun Perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD tahun 2024 sampai dengan 2026. Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran Pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, bahwa Tugas yang diamanatkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap Program Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berdekatan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini adalah untuk menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah laut dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah laut
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 Pada Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Tanah Laut

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab
		4		5		6		7		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			161.922.795.856		20.242.530.181		3.926.964.677		3.926.964.677		19,40%		3.926.964.677		2,43%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		250.000.000	100	16.999.157	-	6.703.200	-	6.703.200	0,00%	39,43%	0,00	6.703.200	0,00%	4,72%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	25,00	150.000.000	6	9.999.403	3	5.953.200	3	5.953.200	50,00%	59,54%	3,00	5.953.200	12,00%	3,97%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		100.000.000	3	6.999.754	2	750.000	2	750.000	66,67%	10,71%	2,00	750.000	0,00%	0,75%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		60.697.728.711	100	11.129.687.664	-	2.189.113.914	-	2.189.113.914	0,00%	19,67%	0,00	2.189.113.914	0,00%	4,50%	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	60.527.728.711	58	11.123.688.104	5	2.187.613.914	5	2.187.613.914	8,62%	19,67%	5,00	2.187.613.914	0,00%	3,61%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	170.000.000	5	5.999.560	2	1.500.000	2	1.500.000	40,00%	25,00%	2,00	1.500.000	0,00%	0,88%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	3.350.820.000	100	65.138.103	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	170.820.000	2	9.138.103	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.180.000.000	20	56.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	8.695.284.300	100	557.655.441	-	117.065.786	-	117.065.786	0,00%	20,99%	0,00	117.065.786	0,00%	17,47%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	177.750.000	1	19.987.787	1	8.870.000	1	8.870.000	100,00%	44,38%	1,00	8.870.000	0,00%	4,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.275.000.000	6	147.621.702	2	22.585.000	2	22.585.000	33,33%	15,30%	2,00	22.585.000	0,00%	0,53%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	200.000.000	1	19.941.538	1	13.207.000	1	13.207.000	100,00%	66,23%	1,00	13.207.000	0,00%	6,60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	400.000.000	3	24.999.901	1	14.685.000	1	14.685.000	33,33%	58,74%	1,00	14.685.000	0,00%	3,67%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.534.300	1	1.530.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		180.000.000	1	15.984.513	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		3.450.000.000	600	327.590.000	50	57.718.786	50	57.718.786	8,33%	17,62%	50,00	57.718.786	0,00%	1,67%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			714.000.000		35.435.912		-		-		0,00%		-		0,00%	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		450.000.000	9	24.414.950	2	-	2	-	22,22%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		264.000.000	1	11.020.962	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (Persen)		54.167.479.485	100	8.036.409.896	-	1.511.541.517	-	1.511.541.517	0,00%	18,81%	0,00	1.511.541.517	0,00%	5,63%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.772.760.000	12	330.130.000	3	50.421.389	3	50.421.389	25,00%	15,27%	3,00	50.421.389	0,00%	2,84%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		52.394.719.485	12	7.706.279.896	3	1.461.120.128	3	1.461.120.128	25,00%	18,96%	3,00	1.461.120.128	0,00%	2,79%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		34.047.483.360	100	401.204.008	-	102.540.260	-	102.540.260	0,00%	25,56%	0,00	102.540.260	0,00%	8,64%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		264.689.760	1	38.487.900	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		3.422.793.600	18	327.000.000	6	86.460.260	6	86.460.260	33,33%	26,44%	6,00	86.460.260	0,00%	2,53%	
Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		180.000.000	16	10.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	75,00%	80,00%	12,00	8.000.000	0,00%	4,44%	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		180.000.000	38	20.000.000	6	2.980.000	6	2.980.000	15,79%	14,90%	6,00	2.980.000	0,00%	1,66%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		30.000.000.000	1	5.716.108	1	5.100.000	1	5.100.000	100,00%	89,22%	1,00	5.100.000	0,00%	0,02%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		15,98%	19,40%			
										Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.660.795.909		460.019.250		460.019.250			12,57%	460.019.250		0,00%	UPTD Kebersihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)				54.212.835	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				46.215.903	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				7.996.932	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)				6.583.074	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				6.583.074	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)				3.600.000.000	-	460.019.250	-	460.019.250	0,00%	12,78%	0,00	460.019.250	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				2.500.000.000	22	270.334.000	22	270.334.000	81,48%	10,81%	22,00	270.334.000	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)				1.100.000.000	2	189.685.250	2	189.685.250	50,00%	17,24%	2,00	189.685.250	0,00%	0,00%	

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			8.820.000.000		1.371.765.422		-		-		0,00%		-		0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Persen)	1,00	-	100	58.265.422	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		-	1	58.265.422	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			8.680.000.000		1.303.500.000		-		-		0,00%		-		0,00%	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	35,00	3.360.000.000	20	473.720.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	35,00	5.320.000.000	23	829.780.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			140.000.000		10.000.000		-		-		0,00%		-		0,00%	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1,00	140.000.000	1	10.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				

						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			15.652.000.000		9.585.300.000						0,00%			-	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Persen)	1,00	392.000.000	100	35.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1,00	392.000.000	1	35.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (24,95 Persen)	34,12	15.260.000.000	0	9.550.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)		15.120.000.000	365	9.530.300.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1,00	140.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%					
						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			67.500.000.000		4.977.500.000						0,00%			-	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

																	man dan Lingkungan Hidup
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	500,00	67.500.000.000	100	4.977.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	500,00	67.500.000.000	181	4.977.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%					
										Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			171.920.000.000		53.293.278.698						0,00%			-	0,00%	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan (Persen)	100,00	171.920.000.000	100	53.293.278.698	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1,00	3.920.000.000	3	300.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	7,00	168.000.000.000	7	52.993.278.698	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%					
						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			1.954.421.520		126.957.098		53.187.000		53.187.000		41,89%		53.187.000		2,72%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (Poin)		1.954.421.520	71,27	126.957.098	-	53.187.000	-	53.187.000	0,00%	41,89%	0,00	53.187.000	0,00%	2,72%	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)		1.954.421.520	2	126.957.098	-	53.187.000	-	53.187.000	0,00%	41,89%	0,00	53.187.000	0,00%	2,72%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	41,89%					
						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			9.561.822.083		1.457.380.248		51.919.200		51.919.200		3,56%		51.919.200		0,54%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (1)		4.879.622.083	1	1.144.888.995	-	24.379.200	-	24.379.200	0,00%	2,13%	0,00	24.379.200	0,00%	1,68%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2,00	3.525.000.000	2	1.042.948.914	-	2.620.000	-	2.620.000	0,00%	0,25%	0,00	2.620.000	0,00%	0,07%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)		1.354.622.083	2	101.940.081	-	21.759.200	-	21.759.200	0,00%	21,35%	0,00	21.759.200	0,00%	1,61%	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut (Persen)	100,00	1.100.000.000	100	44.966.137	-	12.040.000	-	12.040.000	0,00%	26,78%	0,00	12.040.000	0,00%	1,09%	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1,00	1.100.000.000	1	44.966.137	-	12.040.000	-	12.040.000	0,00%	26,78%	0,00	12.040.000	0,00%	1,09%	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.582.200.000		267.525.116		15.500.000		15.500.000		5,79%		15.500.000		0,60%	
Pelaksanaan rehabilitasi	*luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	5,13	1.000.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	*jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1,00	2.582.200.000	1	67.525.116	-	15.500.000	-	15.500.000	0,00%	22,95%	0,00	15.500.000	0,00%	0,60%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	3,56%				

						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			44.239.028.950		4.539.273.674		173.172.900		173.172.900		3,81%		173.172.900		0,39%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Persen)	100,00	44.239.028.950	100	4.539.273.674	-	173.172.900	-	173.172.900	0,00%	3,81%	0,00	173.172.900	0,00%	0,39%	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	5,00	44.239.028.950	5	4.539.273.674	5	173.172.900	1	173.172.900	25,00%	3,81%	1,25	173.172.900	25,00%	0,39%	
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				25,00%	3,81%					
						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			1.885.091.566		167.315.631		12.980.000		12.980.000		7,76%		12.980.000		0,69%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (1)		1.885.091.566	1	167.315.631	-	12.980.000	-	12.980.000	0,00%	7,76%	0,00	12.980.000	0,00%	0,69%	

						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			-		76.572.276		4.500.000		4.500.000		5,88%		4.500.000		0,00%		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (1)	100,00	-	1	76.572.276	-	4.500.000	-	4.500.000	0,00%	5,88%	0,00	4.500.000	0,00%	0,00%		
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)			10	76.572.276	3	4.500.000	3	4.500.000	30,00%	5,88%	3,00	4.500.000	0,00%	0,00%		
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				30,00%	5,88%						
						Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			2.042.500.000		157.056.586		23.747.850		23.747.850		15,12%		23.747.850		1,16%		
Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1)	100,00	2.042.500.000	1	157.056.586	-	23.747.850	-	23.747.850	0,00%	15,12%	0,00	23.747.850	0,00%	1,16%		

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	5,00	2.042.500.000	5	157.056.586	1	23.747.850	1	23.747.850	20,00%	15,12%	1,00	23.747.850	20,00%	1,16%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			20,00%	15,12%					
							Predikat Kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					20.733.244.959		236.952.044		236.952.044		1,14%		236.952.044		0,00%	UPTD Kebersihan
Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah (1)			1	20.733.244.959		236.952.044		236.952.044	0,00%	1,14%	0,00	236.952.044	0,00%	0,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)			1	78.789.000		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)			1	17.375.762.347		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	*Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)			11	551.076.360		-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2025 pada Triwulan I (Pertama) di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat ada beberapa program kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Pada Triwulan I (Pertama) baru terealisasi **Rp 3.926.964.677**. Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2025 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar **9,07%**. untuk realisasi indikator kinerja, dan **4,01%** untuk realisasi anggaran serta masih berjalan untuk realisasi di Triwulan II, III & IV.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Adapun pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Menurut PP No.65 Tahun 2005, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Adapun kriteria penilaian untuk Standar Pelayanan Minimal di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Pelayanan, pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/atau pengrusakan lingkungan Hidup.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam bentuk tabel:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2023

NO	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Penghargaan kebersihan pada tahun-n		2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)	2 (Adipura dan Adiwiyata)						
2	Indeks kualitas air		50,25	50,5	50,75	51	51	58,42	58,52	58,57	58,72	58,82	
3	Indeks kualitas udara ambient		87	87,25	87,5	87,75	87,75	91,85	92,1	95,84	92,15	92,25	
4	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah		5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)	5 BS (100%)						
5	Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah Permukiman		71,06%	72%	73,5%	75%	80%						
6	Persentase Perumahan dan kawasan permukiman yang terfasilitasi Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)		100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)	100% (7 KP)						
7	Persentase jaringan PJU yang bermanfaat bagi masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%						

8	presentase sarana prasana kebersihan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%						
9	Presentase SDM kebersihan lingkungan yg berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%						
10	Persentase RTH yang Terbangun		0,50%	0,5%	1%	3,50 %	5%						
11	Persentase kawasan Taman yang dapat dinikmati masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%						
12	Persentase peningkatan kampung iklim		1 Desa/Kel (4%)	3 Desa/Kel (12%)	6 Desa/Kel (24 %)	6 Desa/ Kel (28%)	6 Desa/ Kel (28%)						
13	Persentase kajian Lingkungan hidup yang bisa di manfaatkan		100%	100%	100%	100%	100%						
15	Persentase Rekomendasi lingkungan (SKKL, Rekom UKL-UPL, SPPL) dan pertimbangan teknis PPLH		100%	100%	100%	100%	100%						

2.3 Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

- Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap “ Komponen Biologi , Geologi dan Fisik “
 - Kabupaten Tanah Laut mempunyai karakteristik alam dengan CH tinggi, kondisi batuan relatif kedap air, kawasan hutan lindung kurang mendukung sebagai fungsi lindung dan resapan, sehingga saat penghujan selalu terjadi banjir
 - Telah terjadi kerusakan lahan dan hutan di bagian atas (hulu) akibat aktivitas penambangan dan konversi hutan ke lahan perkebunan, sehingga erosi dan sedimentasi tinggi, yang menyebabkan pendangkalan alur sungai, pencemaran lingkungan, dan semakin meningkatkan bencana banjir.

- Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap “Komponen Sosial Ekonomi”
 - Rata-rata kualitas penduduk masih rendah, khususnya pendidikan dan ekonomi (kemiskinan).
 - Permasalahan pemerataan penduduk, karena penduduk migran umumnya terakumulasi di wilayah kecamatan dengan potensi tambang tinggi (Kintap, Jorong, dan Batu Ampar).
 - Kesadaran lingkungan masih rendah, akibat tuntutan hidup tinggi dan tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam yang tinggi pula
- Isu strategis yang memberi dampak terhadap “Tata Ruang” (Daya dukung dan daya Tampung Lingkungan)
 - Masih terdapat tumpang tindih status peruntukan lahan, antara kawasan hutan lindung dengan pertambangan dan perkebunan.
 - Skala RTRW belum dapat dioperasionalkan untuk manajemen lingkungan.
 - Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum diimplementasikan
- Isu strategis yang memberi dampak perubahan terhadap “Kelembagaan”
 - Pembiayaan bidang lingkungan hidup masih rendah.
 - Kualitas sumberdaya manusia dan prasarana untuk perlindungan & pengelolaan lingkungan masih terbatas.
 - Belum ada mekanisme penanganan lingkungan secara menyeluruh dan terpadu.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD merupakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan tingkat kinerja yang dicapai.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tolak ukur atau target sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sebagaimana yang tercantum.

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan Renja Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tanah Laut**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	Rp20.242.530.180,76		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	16.999.156,77		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9,999,403.17	Fotocopy dan Penjilidan Dokumen DPA, Dokumen DPAP, Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen RKA, Dokumen RKAP	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6,999,753.60	Fotocopy dan Penjilidan Dokumen Lakip, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	11.129.687.664,00		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	11,123,688,104.00	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5,999,560.00	Belanja Photocopy dan Penjilidan Laporan Keuangan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-		
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua	Jumlah Laporan Penatausahaan	-	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	Barang Milik Daerah pada SKPD				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	65.138.102,75		
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	9.138.102,75	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	56.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	557.655.440,79		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.987.786,61	Belanja Baterai AA dan AAA, Stop Kontak, Kabel, Lampu, Saklar	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	147.621.702,27	Belanja ATK, Kertas, Materai, Catridge Warna dan Hitam, Tinta Printer, Flashdisk, Tumbler, Belanja Alat pendingin, Komputer, Laptop, Printer dan Scanner	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.941.538,41	Sapu Lidi, Sapu Lantai, Kemoceng, Selang, Cairan Pembersih Kaca, Sabun Cuci Tangan, Cairan Pembersih Closet, Pengharum Ruangan, Hand Sanitizer, Tisu, Serok Sampah, Sabun Cuci Piring, Gunting dahan dan ranting, Pengharum ruangan gantung, Kaset, Alat Pel Lantai, Plastik Sampah, Kapur Barus, Kain Lap, Cairan Pembersih lantai dan keramik, dan Kain Pel	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24.999.901,00	Menyediakan Peralatan Barang Cetak Kantor	

	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.530.000,00	Belanja Paket Data Internet	
	13	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,984,512.50	Belanja Bahan/Material Untuk Kantor	
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	327.590.000,00	Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.435.912,45		
	15	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	24,414,950.00	Belanja Mebel Untuk Kegiatan Kantor	
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,020,962.45	Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Kegiatan Kantor	
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	8.036.409.896,00		
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330.130.000,00	Belanja listrik dan tagihan telepon	
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.706.279.896,00	Belanja Honorarium Tim, Outsourcing Kebersihan , Jasa Tenaga Laboratorium , Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum , Jasa Tenaga Administrasi dan Belanja luran Jaminan/Asuransi	

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	401.204.008,00		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.487.900,00	Belanja BBM	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	327.000.000,00	Belanja Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
21	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	10,000,000.00	Belanja Pemeliharaan Mebel	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	38 Unit	20,000,000.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,716,108.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		-	-	1.371.765.422,15		
9	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	58.265.422,15		

	24	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	58.265.422,15	Jasa Konsultansi	
10	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-	-	1.303.500.000,00		
	25	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	473.720.000,00	Belanja Hibah	
	26	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	23 Unit Rumah	829.780.000,00	Belanja Hibah	
	27	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Unit Rumah	-	Belanja Modal	
11	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			-	-	10.000.000,00		
	28	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000,00	perjadi dalam daerah	

3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		-	-	9.585.300.000,00		
	12	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	-	35.000.000,00		
	29	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan dokumen bidang PKP	
13		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	-	9.550.300.000,00		
	30	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	365 Unit Rumah	9.530.300.000,00	Bedah Rumah/Belanja Hibah	
	31	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Dokumen verifikasi permukiman kumuh	
4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		-	-	4.977.500.000,00		
	14	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		-	-	4.977.500.000,00		
	32	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	181 Unit Rumah	4.977.500.000,00	Bedah Rumah/Belanja Hibah	

5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		-	-	53.293.278.697,93		
	15	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		-	-	53.293.278.697,93		
		33 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 Dokumen	299.999.999,70	Dokumen inventarisasi kebutuhan PSU	
		34 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	52.993.278.698,23	Belanja Modal	
6		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	126.957.098,32		
	16	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		-	-	126.957.098,32		
		35 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	126.957.098,32	Belanja ATK, Penjilidan, Honorarium Penyusun, Makanan Minuman Rapat , Makanan Minuman Aktivitas Lapangan (Surveydan Tanam Pohon), Belanja Jasa Gali Lubang, Belanja Pupuk, Belanja Perjalanan Dinas untuk Pengumpulan Data dan Survey, Belanja Modal untuk Pengolahan (PC, Tenda Portable, Meja Lipat)	
7		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	1.457.380.248,15		
	17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	-	1.144.888.995,15		
		36 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	1.042.948.913,99	Bahan bahan kimia,fotokopi,jilid, suku cadang, jasa kalibrasi, annual maintenance alat Onlino dan pemeliharaan Onlino, biaya telpon dan listrik untuk alat Onlino, jasa pemeriksaan sampel laboratorium, inventarisasi dokumen beban pencemar sungai tabanio, atk, spanduk, pemeliharaan komputer, makan minum	

						rapat, perjalanan dinas biasa dan luar daerah (terkait ONLIMO), baju pakaian dinas lapangan (celana lapangan)		
	37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	101.940.081,16	Belanja ATK, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Komputer, Belanja Souvenir/Cinderamata, Belanja Hadiah untuk Desa/Kelurahan Kategori Proklamasi Utama (Printer), Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Topi Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Perjalanan Dinas dalam kota, Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi proklamasi, sosialisasi SRN, serta penerimaan apresiasi, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jogja dalam rangka pengayaan wawasan bagi Desa Proklamasi, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka penerimaan apresiasi atau penghargaan proklamasi bagi anggota masyarakat, dan Belanja Modal Sepatu Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Harddisk dan Printer), Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga NIRLABA sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan (7 Desa)	
	18	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	-	44.966.137,00		
	38	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	44.966.137,00	Pamflet, spanduk, fotocopy, ATK, alat bahan komputer (tinta printer), makan minum sosialisasi, honor narasumber, transport narasumber, honor moderator, uang saku peserta sosialisasi, uang kepesertaan (kontribusi diklat teknis bidang P3LH), uang harian diklat teknis, penginapan diklat, transportasi diklat teknis, perjalanan dinas untuk narasumber sosialisasi, perjalanan dinas dalam kota, Personal computer , UPS, honorarium pembaca doa	
	19	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	-	267.525.116,00		
	39	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di	1 Kegiatan	67.525.116,00	Pupuk,bibit tanaman,pamflet,Penjilidan,spanduk,Fotokopi,belanja alat perabot kantor untuk bersih sungai dan penanaman pohon,belanja pipa plastik,Makan minum lapangan, (kontribusi diklat teknis bidang P3LH), uang harian diklat	

				kabupaten/kota yang dilaksanakan			teknis, penginapan diklat, transportasi diklat teknis, perjalanan dinas dalam kota, Personal computer , UPS., GPS	
		40	Pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	200.000.000,00	Belanja Bibit Tanaman
8			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		-	-	4.539.273.673,94	
	20		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		-	-	4.539.273.673,94	
		41	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	4.539.273.673,94	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Belanja Bahan-Bahan Kimia - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - Belanja Suku Cadang Peralatan Kelistrikan Pertamanan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Sub Pertamanan dan Sub Penebangan Pohon) - Belanja Peralatan Rumah Tangga/ Pembersih - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Belanja Jasa Tenaga Bantu Pertamanan (insektif) - Belanja Jasa Tenaga Tukang - Upah Pekerja Pengecatan 6 Pemeliharaan Taman/RTH, Median Jalan, Tugu/Gerbang Batas Kota - Upah Tenaga Pekerja 6 Tenaga Landsekap - Belanja Tagihan Air - Belanja Tagihan Air \$RTH Brigjen H. Hasan Basri, RTP Pasar Lawas, RTH Kijang Mas) - Pemeliharaan Mesin Pompa Air - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

						<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Taman - Belanja Modal Tanaman*****- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Belanja Bahan-Bahan Kimia - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - Belanja Suku Cadang Peralatan Kelistrikan Pertamanan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Sub Pertamanan dan Sub Penebangan Pohon) - Belanja Peralatan Rumah Tangga/ Pembersih - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Belanja Jasa Tenaga Bantu Pertamanan (insemtif) - Belanja Jasa Tenaga Tukang - Upah Pekerja Pengecatan 6 Pemeliharaan Taman/RTH, Median Jalan, Tugu/Gerbang Batas Kota - Upah Tenaga Pekerja 6 Tenaga Landsekap - Belanja Tagihan Air - Belanja Tagihan Air \$RTH Brigjen H. Hasan Basri, RTP Pasar Lawas, RTH Kijang Mas) - Pemeliharaan Mesin Pompa Air - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Taman - Belanja Modal Tanaman*****- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Belanja Bahan-Bahan Kimia - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - Belanja Suku Cadang Peralatan Kelistrikan Pertamanan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Sub Pertamanan dan Sub Penebangan Pohon) - Belanja Peralatan Rumah Tangga/ Pembersih - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
--	--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Jasa Tenaga Bantu Pertamanan (insentif) - Belanja Jasa Tenaga Tukang - Upah Pekerja Pengecatan 6 Pemeliharaan Taman/RTH, Median Jalan, Tugu/Gerbang Batas Kota - Upah Tenaga Pekerja 6 Tenaga Landsekap - Belanja Tagihan Air - Belanja Tagihan Air \$RTH Brigjen H. Hasan Basri, RTP Pasar Lawas, RTH Kijang Mas) - Pemeliharaan Mesin Pompa Air - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Taman - Belanja Modal Tanaman"" ""- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi - Belanja Bahan-Bahan Kimia - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya - Belanja Suku Cadang Peralatan Kelistrikan Pertamanan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Sub Pertamanan dan Sub Penebangan Pohon) - Belanja Peralatan Rumah Tangga/ Pembersih - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Belanja Jasa Tenaga Bantu Pertamanan (insentif) - Belanja Jasa Tenaga Tukang - Upah Pekerja Pengecatan 6 Pemeliharaan Taman/RTH, Median Jalan, Tugu/Gerbang Batas Kota - Upah Tenaga Pekerja 6 Tenaga Landsekap - Belanja Tagihan Air - Belanja Tagihan Air \$RTH Brigjen H. Hasan Basri, RTP Pasar Lawas, RTH Kijang Mas) - Pemeliharaan Mesin Pompa Air - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
--	--	--	--	--	--	--

						Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Taman - Belanja Modal Tanaman"	
9		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	167.315.630,67		
21		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	167.315.630,67		
42		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	89.252.382,86	Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer (Tinta), Belanja Topi Lapangan, Belanja Tumbler, Belanja Sepatu BOOT, Makanan Minuman Rapat Kegiatan, Belanja Baju Lapangan, Belanja Honorairum Narasumber Sosialisasi Teknis, Belanja Jasa Tenaga Ahli (Biaya Pengecekan Kebenaran Dokumen KA, Tim Teknis, Tim Komisi AMDAL, Belanja In House Training Dasar-Dasar AMDAL, Belanja Pelatihan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Laptop
43		Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	-	Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer ,Belanja Kertas dan Cover, Belanja Perjalanan Dinas
44		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang	31.000.000,00	Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer ,Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bimtek
45		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	47.063.247,81	Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer ,Belanja Kertas dan Cover, Belanja Topi Lapangan, Belanja Sepatu Safety, Belanja Baju Lapangan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Laptop dan Printer.

		bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
10		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		-	-	57.277.570,84	
	22	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	57.277.570,84	
	46	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	57.277.570,84	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan komputer, Sepatu Lapangan, Baju Lapangan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Perjalanan Dinas
11		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	76.572.276,11	
	23	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		-	-	76.572.276,11	
	47	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	76.572.276,11	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan komputer, Sepatu Lapangan, Baju Lapangan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja uji sampel laboratorium dan Perjalanan Dinas
12		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		-	-	157.056.585,98	
	24	Pengelolaan Sampah		-	-	157.056.585,98	
	48	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang	5 Kelompok	157.056.585,98	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Kontruksi, Belanja Bahan - Bahan Kimia, Belanja Bahan - Bahan/ Bibit Tanaman, Belanja Bahan- Bahan Lainnya, Belanja ATK, Belanja Bahan Komputer, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

				Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinder Mata, Belanja Natura dan Pakan-Pakan,Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, Belanja Sepatu Safety, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Laptop dan Printer.	
13		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	214.876.808,62		UPT LABORATORIUM
	25	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	46.559.523,82		
	49	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.904.452,82	Belanja Barang Pakai Habis	
	50	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	9.985.071,00	Belanja Jasa Kantor	
	51	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,670,000.00	Belanja Photocopy dan Penjilidan Laporan Keuangan	
	26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	120.907.784,80		
	52	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	72.908.995,80	Pemeliharaan lemari dan kursi	
	53	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	47,998,789.00	Belanja alat pemotong rumput, Genset, Mesin pembersih	
	27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	47.409.500,00		

	54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40,459,500.00	Belanja BBM, Pemeliharaan roda 4 , roda 2 dan roda 3 dan Genset	
	55	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	-	Pemeliharaan lemari dan kursi	
	56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6.950.000,00	Belanja alat pemotong rumput, Genset, Mesin pembersih	
14		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-	-	4,128,761,130.00		
	28	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		-	-	4,128,761,130.00		
	57	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	5 Dokumen	4,128,761,130.00	Belanja Bahan Kimia, Penambah Daya Tahan Tubuh, alat laboratorium, honorarium narasumber, jasa tenaga laboratorium, kalibrasi, isi tabung gas, suku cadang alat laboratorium, pakaian dinas lapangan, pakaian kerja laboratorium, jasa pengangkutan limbah,	
15		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	3.660.795.909,34		UPT KEBERSIHAN
	29	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	54.212.835,34		
	58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	46.215.903,09	Belanja ATK & Bahan Komputer	
	59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.996.932,25	Belanja ATK, Cetak Buku/Penjilidan, Fotocopy & Materai	

30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	6.583.074,00		
60	Pengadaan Alat Besar	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	-	Meja, Kursi, Sofa & Lemari	
61	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6.583.074,00	Pembelian Alat Berat	
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	3.600.000.000,00		
62	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	2.500.000.000,00	Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan	
63	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	1.100.000.000,00	Bahan Bakar dan Pelumas Pemeliharaan	
16	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		-	-	20.733.244.958,59		
32	Pengelolaan Sampah		-	-	20.733.244.958,59		
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.</i>	1 Dokumen	78,789,000.00	Makan Minum Aktivitas Lapangan / Rapat dan Perjalanan Dinas	

			<i>Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>				
65	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	17,375,762,347.00	Peralatan Kebersihan dan Pengerjaan Fisik	
66	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	153000 Ton	2,727,617,251.80	Peralatan Kebersihan, Sarana dan Prasarana Kebersihan, Belanja Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh, Jasa Laboratorium, Tagihan Listrik/Internet, Retribusi Sampah, Pembelian Kontainer & Pemeliharaan Kontainer	
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan	11 Unit	551,076,359.79	Belanja Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	

				sampah yang tertangani				
J U M L A H						124.789.886.191,40		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta penataan ruang. Salah satu kebijakan nasional dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan mempercepat pembangunan ekonomi daerah terutama daerah yang relatif belum berkembang secara efektif/fokus melalui pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi daerah yang dimiliki sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada pendayagunaan sumberdaya alam seyogyanya memperhatikan keserasian antar sektor pembangunan, lingkungan hidup, dan kelayakan permukiman yang terlayani oleh prasarana wilayah. Pendekatan yang bersifat komprehensif ini dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah melalui penataan ruang. Dalam upaya pemerataan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah tidak dapat lepas dari kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memperhatikan peraturan penataan ruang sehingga terlaksana pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 sangat memperhatikan masalah pengembangan Lingkungan Hidup dan keberlangsungan lingkungan hidup, ini dapat dilihat dari visi dan misi kepala daerah poin ke 9 (sembilan) yaitu : *Peningkatan Penyelamatan dan Kelestarian Lingkungan*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRKPLH dalam memenuhi amanat undang-undang khususnya di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi ada Rencana Kerja Perubahan pada tahun 2025 dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup akan melaksanakan 16 (Enam Belas) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) dan 62 (Enam Puluh Dua) sub. kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 119,984,886,193.36,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Enam Rupiah). Dimana pemilihan program/kegiatan prioritas ditinjau berdasarkan upaya untuk memenuhi amanat visi misi pembangunan yang ada didalam RPJMD, pemenuhan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007, dan pemenuhan tujuan dalam MDGs (*Millenium Development Goals*).

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 serta perkiraan maju tahun 2026 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanah Laut**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				88.811.494.099,00	109.660.563.835,62	124.834.886.191,40	36.023.392.092,40							113.383.034.106,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.746.038.755,00	59.733.478.754,69	69.237.829.191,08	19.491.790.436,08							54.810.000.000,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				49.746.038.755,00	59.733.478.754,69	69.237.829.191,08	19.491.790.436,08							54.810.000.000,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan	100 Persen	100 Persen	3.500.000.000,00	1.397.440.000,00	1.371.765.422,15	675.000.000,00							4.175.000.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	80.000.000,00	69.300.000,00	58.265.422,15	-21.734.577,85			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		100.000.000,00
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

		<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	69.300.000,00	58.265.422,15	-21.734.577,85	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	-	100 Persen	3.400.000.000,00	1.308.140.000,00	1.303.500.000,00	-2.096.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		4.050.000.000,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
		<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	500.000.000,00	474.400.000,00	473.720.000,00	-26.280.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			600.000.000,00
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
		<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	23 Unit Rumah	23 Unit Rumah	850.000.000,00	833.740.000,00	829.780.000,00	-20.220.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			950.000.000,00
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

		<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	2.050.000.000,00	0,00	0,00	-2.050.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			2.500.000.000,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	-	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	ASN		25.000.000,00
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
		<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			25.000.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 Persen	100 Persen	9.616.000.000,00	9.616.000.000,00	9.585.300.000,00	-3.221.000.000,00							6.395.000.000,00

1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		70.000.000,00
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			70.000.000,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	24,95 Persen	24,95 Persen	9.581.000.000,00	9.581.000.000,00	9.550.300.000,00	-30.700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		6.325.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>	365 Unit Rumah	365 Unit Rumah	9.561.000.000,00	9.561.000.000,00	9.530.300.000,00	-30.700.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			2.700.000.000,00
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														

		<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			25.000.000,00
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
		<i>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan</i>	0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			3.600.000.000,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.977.500.000,00	8.500.000.000,00							13.500.000.000,00
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 Persen	100 Persen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.977.500.000,00	-22.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		13.500.000.000,00
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	181 Unit Rumah	181 Unit Rumah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.977.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			13.500.000.000,00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase capaian Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100 Persen	100 Persen	31.620.053.684,00	43.710.053.683,69	53.293.278.697,93	-920.053.684,00							30.700.000.000,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan</i>	100 Persen	100 Persen	31.620.053.684,00	43.710.053.683,69	53.293.278.697,93	21.673.225.013,93			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		30.700.000.000,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	1 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	299.999.999,70	299.999.999,70	-0,30	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			700.000.000,00

1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
		<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	7 Lokasi	7 Lokasi	31.320.053.684,00	43.410.053.683,99	52.993.278.698,23	21.673.225.014,23	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			30.000.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32							58.573.034.106,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32							58.573.034.106,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dinas PRKPLH	89,1 Nilai	89,1 Nilai	22.197.835.536,00	22.265.880.696,40	24.163.202.898,72	17.638.429.977,00							39.836.265.513,00
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	16.999.507,00	16.999.157,17	16.999.156,77	-350,23			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD		30.000.000,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.753,00	9.999.403,17	9.999.403,17	-349,83	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00

1.04.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan	3 Laporan	6.999.754,00	6.999.754,00	6.999.753,60	-0,40	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			10.000.000,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	9.023.123.507,00	9.023.123.507,00	11.129.687.664,00	2.106.564.157,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD		12.614.988.706,00
1.04.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	57 Orang/bulan	71 Orang/bulan	9.017.123.947,00	9.017.123.947,00	11.123.688.104,00	2.106.564.157,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			12.584.988.706,00
1.04.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	5.999.560,00	5.999.560,00	5.999.560,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		50.000.000,00
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	145.386.730,00	168.111.865,70	65.138.102,75	-80.248.627,25			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		274.200.000,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	2 Paket	21.886.730,00	44.611.865,70	9.138.102,75	-12.748.627,25	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			24.200.000,00
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	20 Orang	20 Orang	123.500.000,00	123.500.000,00	56.000.000,00	-67.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	705.429.377,00	701.988.491,28	658.427.799,95	-47.001.577,05			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		2.003.183.000,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	10.009.774,00	10.009.774,00	19.987.786,61	9.978.012,61	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			27.500.000,00
1.04.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	6 Paket	130.258.631,00	158.682.956,00	147.621.702,27	17.363.071,27	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			750.000.000,00
1.04.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	14.982.104,00	14.982.104,00	19.941.538,41	4.959.434,41	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			16.000.000,00
1.04.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	3 Paket	24.999.901,00	24.999.901,00	24.999.901,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			1.683.000,00
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.984.512,50	984.512,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	600 Laporan	600 Laporan	368.695.000,00	349.195.000,00	327.590.000,00	-41.105.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			575.000.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	100 Persen	162.926.771,00	162.926.771,25	162.926.771,25	0,25			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		3.617.100.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	9 Unit	9 Unit	24.414.950,00	24.414.950,00	24.414.950,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	11.020.962,00	11.020.962,45	11.020.962,45	0,45	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000,00

1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	8.102.848.636,00	8.151.609.896,00	8.036.409.896,00	-66.438.740,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		9.027.913.247,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	268.600.000,00	330.130.000,00	330.130.000,00	61.530.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			295.460.000,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	7.834.248.636,00	7.821.479.896,00	7.706.279.896,00	-127.968.740,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			8.732.453.247,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Persen	100 Persen	4.041.121.008,00	4.041.121.008,00	4.093.613.508,00	52.492.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	SKPD Kab. Tanah Laut		12.218.880.560,00

1.04.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	1 Unit	38.487.900,00	38.487.900,00	38.487.900,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			44.114.960,00
1.04.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	18 Unit	327.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			570.465.600,00
1.04.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel														
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	16 Unit	16 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00
1.04.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	38 Unit	38 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1 Unit	5.716.108,00	5.716.108,00	5.716.108,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000.000,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	100 Persen	100 Persen	249.945.242,00	175.120.152,98	126.957.098,32	-44.096.409,00							205.848.833,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Indeks Kualitas Air</i>	71,27 Poin	71,27 Poin	249.945.242,00	175.120.152,98	126.957.098,32	-122.988.143,68			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		205.848.833,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														

		<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	249.945.242,00	175.120.152,98	126.957.098,32	-122.988.143,68	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			205.848.833,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	5.921.270.650,00	6.008.426.319,23	5.586.141.378,15	-2.755.208.567,00							3.166.062.083,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut</i>	100 %	100 %	5.752.446.651,00	5.662.068.583,01	5.273.650.125,15	-478.796.525,85			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		2.179.622.083,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2.214.467.342,00	2.174.241.933,89	1.042.948.913,99	-1.171.518.428,01	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAA NN YA BIDANG KESEHATA N	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			665.000.000,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	237.938.179,00	187.785.519,12	101.940.081,16	-135.998.097,84	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			514.622.083,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut</i>	100 Persen	100 Persen	72.814.763,00	60.324.500,22	44.966.137,00	-27.848.626,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		210.000.000,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	1 Laporan	1 Laporan	72.814.763,00	60.324.500,22	44.966.137,00	-27.848.626,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			210.000.000,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	96.009.236,00	286.033.236,00	267.525.116,00	171.515.880,00			-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		776.440.000,00
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														

		<i>luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	-	1 Ha	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH DBH SAWIT	-	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		300.000.000,00
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi													
		<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96.009.236,00	86.033.236,00	67.525.116,00	-28.484.120,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		476.440.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat	100 Persen	100 Persen	3.881.000.351,00	3.042.079.454,02	4.539.273.673,94	2.055.064.076,00						5.936.064.427,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat</i>	100 Persen	100 Persen	3.881.000.351,00	3.042.079.454,02	4.539.273.673,94	658.273.322,94			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	SKPD	5.936.064.427,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													

		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola</i>	5 Unit	5 Unit	3.881.000.351,00	3.042.079.454,02	4.539.273.673,94	658.273.322,94	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		5.936.064.427,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	327.877.964,00	263.017.089,85	167.315.630,67	490.895.286,00						818.773.250,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut</i>	100 %	100 %	327.877.964,00	263.017.089,85	167.315.630,67	-160.562.333,33			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	818.773.250,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
		<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	128.198.089,00	122.397.689,00	89.252.382,86	-38.945.706,14	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		308.773.250,00
2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup													

		<i>Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD</i>	1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			130.000.000,00
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
		<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	3 Orang	3 Orang	73.500.000,00	63.500.000,00	31.000.000,00	-42.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			130.000.000,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
		<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	91.179.875,00	77.119.400,85	47.063.247,81	-44.116.627,19	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			250.000.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat	2 Penghargaan	2 Penghargaan	58.309.256,00	43.946.214,43	57.277.570,84	56.690.744,00							115.000.000,00

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota</i>	100 %	100 %	58.309.256,00	43.946.214,43	57.277.570,84	-1.031.685,16			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab. Tanah Laut		115.000.000,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
		<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>	2 Entitas	2 Entitas	58.309.256,00	43.946.214,43	57.277.570,84	-1.031.685,16	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			115.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Ditangani	100 %	100 %	122.671.178,00	106.819.489,73	76.572.276,11	48.928.822,00							171.600.000,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</i>	100 %	100 %	122.671.178,00	106.819.489,73	76.572.276,11	-46.098.901,89			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Perorangan, Kelompok, Masyarakat		171.600.000,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

		<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>	10 Pengaduan	10 Pengaduan	122.671.178,00	106.819.489,73	76.572.276,11	-46.098.901,89	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		171.600.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	100 Persen	100 Persen	6.316.530.238,00	18.031.780.735,29	20.890.301.544,57	2.046.889.762,00						8.363.420.000,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>persentase Capaian Pengelolaan Sampah</i>	100 %	100 %	6.316.530.238,00	18.031.780.735,29	20.890.301.544,57	14.573.771.306,57			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat	8.363.420.000,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	5 Kelompok	5 Kelompok	249.997.957,00	194.930.819,60	157.056.585,98	-92.941.371,02	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		402.500.000,00
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				88.811.494.099,00	109.660.563.835,62	124.834.886.191,40	36.023.392.092,40						113.383.034.106,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.746.038.755,00	59.733.478.754,69	69.237.829.191,08	19.491.790.436,08						54.810.000.000,00

1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				49.746.038.755,00	59.733.478.754,69	69.237.829.191,08	19.491.790.436,08						54.810.000.000,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dinas PRKPLH	89,1 Nilai	89,1 Nilai	22.197.835.536,00	22.265.880.696,40	24.163.202.898,72	17.638.429.977,00						39.836.265.513,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhuan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	705.429.377,00	701.988.491,28	658.427.799,95	-47.001.577,05			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN	2.003.183.000,00
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.985.071,00	9.985.071,00	9.985.071,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		40.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32						58.573.034.106,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32						58.573.034.106,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	19.990.720,00	19.990.720,00	15.904.452,82	-4.086.267,18	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	49.985.000,00	37.620.000,00	20.670.000,00	-29.315.000,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			160.000.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	162.926.771,00	162.926.771,25	162.926.771,25	0,25			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN		3.617.100.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	26 Unit	20 Unit	72.908.996,00	72.908.995,80	72.908.995,80	-0,20	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00

1.04.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit	7 Unit	47.998.789,00	47.998.789,00	47.998.789,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	4.041.121.008,00	4.041.121.008,00	4.093.613.508,00	52.492.500,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN		12.218.880.560,00
1.04.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	2 Unit	2 Unit	32.967.000,00	32.967.000,00	40.459.500,00	7.492.500,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00
1.04.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	13 Unit	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Angsau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			23.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	5.921.270.650,00	6.008.426.319,23	5.586.141.378,15	-2.755.208.567,00							3.166.062.083,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	-	100 Persen	5.752.446.651,00	5.662.068.583,01	5.273.650.125,15	-478.796.525,85			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Masyarakat		2.179.622.083,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	3.300.041.130,00	3.300.041.130,00	4.128.761.130,00	828.720.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			1.000.000.000,00
	UPTD KEBERSIHAN				88.811.494.099,00	109.660.563.835,62	124.834.886.191,40	36.023.392.092,40							113.383.034.106,00

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32							58.573.034.106,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				39.065.455.344,00	49.927.085.080,93	55.597.057.000,32	16.531.601.656,32							58.573.034.106,00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dinas PRKPLH	89,1 Nilai	89,1 Nilai	22.197.835.536,00	22.265.880.696,40	24.163.202.898,72	17.638.429.977,00							39.836.265.513,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	705.429.377,00	701.988.491,28	658.427.799,95	-47.001.577,05			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN		2.003.183.000,00
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	5 Paket	49.993.176,00	49.993.176,00	46.215.903,09	-3.777.272,91	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			222.000.000,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														

		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	9.999.789,28	7.996.932,25	-2.003.067,75	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			111.000.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	162.926.771,00	162.926.771,25	162.926.771,25	0,25			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN		3.617.100.000,00
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
		<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			3.330.000.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	6.583.074,00	6.583.074,00	6.583.074,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			122.100.000,00

1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	4.041.121.008,00	4.041.121.008,00	4.093.613.508,00	52.492.500,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	ASN		12.218.880.560,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	27 Unit	27 Unit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			4.273.500.000,00
1.04.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
		<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	4 Unit	4 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			2.197.800.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	100 Persen	100 Persen	6.316.530.238,00	18.031.780.735,29	20.890.301.544,57	2.046.889.762,00							8.363.420.000,00

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Capaian Pengelolaan Sampah</i>	100 %	100 %	6.316.530.238,00	18.031.780.735,29	20.890.301.544,57	14.573.771.306,57			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat		8.363.420.000,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	399.630.000,00	195.202.000,00	78.789.000,00	-320.841.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			512.820.000,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>	1 Unit	1 Unit	3.223.372.281,00	15.198.162.347,89	17.375.762.347,00	14.152.390.066,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			4.395.600.000,00
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														

		<i>Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik</i>	-	11 Unit	0,00	0,00	551.076.359,79	551.076.359,79	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 04. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		0,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	153000 Ton	15.300 Ton	2.443.530.000,00	2.443.485.567,80	2.727.617.251,80	284.087.251,80	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik		3.052.500.000,00
J U M L A H					88.811.494.099,00	109.660.563.835,62	124.834.886.191,40	36.023.392.092,40						113.383.034.106,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut yang didalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selain menjadi acuan pelaksana kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Renja juga memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan Rencana dimasa mendatang. Adanya Renja ini para pimpinan dan seluruh staf dan jajarannya di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu di tingkat kementerian (pemerintahan pusat), pemerintah provinsi, kabupaten, serta juga di lingkup swasta dan masyarakat sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, adil, transparan dan berkesinambungan.

Demikian Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, semoga dengan adanya Renja Perubahan ini dapat bermanfaat untuk penyusunan Renja Perubahan Tahun berikutnya, sebagai pedoman dan acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan yang akan datang.

Pelaihari, 2025
Plt.KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
KABUPATEN TANAH LAUT,

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST.M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709-200701 1 022